

STRATEGI BPD DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI DESA LOLOMAYA KECAMATAN OOU KABUPATEN NIAS SELATAN

Oleh:

Teguh Irwandi Laia¹

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan²

Dewi ernawati Sirait³

Universitas Darma Agung, medan^{1,2,3}

Email:

irwandrilaia@gmail.com

dolipanjaitan@gmail.com

dewiernawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi BPD dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa di desa Lolomaya Kecamatan Oou Kabupaten Nias Selatan. Dan untuk mengetahui faktor penghambat strategi BPD dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa di desa Lolomaya Kecamatan Oou Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari analisis terhadap strategi pengawasan yang diterapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lolomaya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan inklusif dan transparan telah membawa dampak positif yang signifikan bagi kualitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Melalui partisipasi aktif masyarakat, publikasi laporan secara berkala, serta kolaborasi erat antara perangkat desa dan BPD, Desa Lolomaya mampu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintahan didasarkan pada konsultasi yang luas dan mendalam dengan warga. Adanya pengawasan yang ketat juga telah meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pengelolaan dana desa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan menjadi hambatan utama bagi BPD Desa Lolomaya dalam menjalankan pengawasan efektif terhadap kinerja pemerintahan desa. Kurangnya anggota dengan keterampilan spesifik seperti keuangan, serta dana yang terbatas untuk inspeksi lapangan dan pengembangan teknologi, menjadi tantangan serius yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan.

Kata Kunci: Strategi, BPD, Kinerja

ABSTRACT

This research aims to determine the BPD's strategy in monitoring village government performance in Lolomaya village, Oou District, South Nias Regency. And to find out the factors inhibiting BPD's strategy in monitoring village government performance in Lolomaya village, Oou subdistrict, South Nias regency. This research uses a qualitative approach using data collection techniques using interviews, documentation and observation. From the analysis of the monitoring strategy implemented by the Village Consultative Body (BPD) in Lolomaya Village, it can be concluded that the inclusive and transparent approach has had a significant positive impact on the quality and accountability of village government. Through active community participation, regular publication of reports, and close collaboration between village officials and the BPD, Lolomaya Village is able to ensure that every government decision and action is based on broad and in-depth consultation with residents. The existence of strict supervision has also increased efficiency in implementing development projects and managing village funds, as well as strengthening community trust in the village government.

Limited human and financial resources are the main obstacles for the Lolomaya Village BPD in carrying out effective supervision of village government performance. The lack of members with specific skills such as finance, as well as limited funds for field inspections and technology development, are serious challenges that need to be addressed to increase monitoring efficiency.

Keywords: *Strategy, BPD, Performanc*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa”, yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, menandai sebuah perubahan signifikan dalam tata kelola desa di Indonesia. Undang-undang ini merupakan manifestasi dari political will pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan besar dalam pelayanan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Sebelum disahkannya undang-undang ini, kepala desa dan perangkatnya telah berjuang melalui berbagai bentuk aksi, seperti demonstrasi, untuk mendorong adanya perubahan. Kehadiran UU Desa ini diterima dengan penuh harapan oleh masyarakat desa, yang melihatnya sebagai kebijakan yang akan membawa perbaikan dalam kehidupan mereka.

Salah satu kebijakan kunci dari UU Desa ini adalah alokasi anggaran yang signifikan kepada desa. Anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan penghasilan tetap serta tunjangan kepada kepala desa dan perangkatnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di desa. Dengan adanya UU Desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diperbesar, termasuk fungsi pengawasannya yang diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan bersih, efektif, dan efisien.

Desentralisasi fiskal yang diberikan kepada desa memberikan kesempatan bagi desa untuk menggunakan anggaran mereka secara lebih mandiri sesuai dengan kebijakan yang diambil. Hal ini penting mengingat peran desa yang strategis dalam

struktur pemerintahan dan kehidupan sosial-ekonomi negara. BPD, dalam kapasitasnya sebagai lembaga pengawasan, memiliki peranan penting dalam memastikan dana desa digunakan dengan benar. BPD diharapkan melakukan pengawasan preventif, yaitu pengawasan terhadap kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat, dana desa, dan aset desa.

Namun, meskipun BPD memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa, terdapat berbagai tantangan yang sering kali menghambat efektivitasnya. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk kurangnya kapasitas dan sumber daya, serta adanya konflik kepentingan. Hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan dana desa yang tidak optimal dan menghambat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Di Desa Lolomaya, Kecamatan Oou, Kabupaten Nias Selatan, terdapat indikasi bahwa BPD belum menjalankan fungsinya secara optimal. Berdasarkan observasi awal, beberapa masalah teridentifikasi, antara lain:

1. **Kinerja BPD yang Belum Optimal:** Kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya masih belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh UU. Ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi fungsi-fungsi pengawasan dan perencanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPD.
2. **Kepentingan Pribadi:** Terjadi kecenderungan di antara pimpinan dan anggota BPD untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat

desa. Hal ini dapat mengganggu integritas dan efektivitas BPD dalam menjalankan tugasnya.

3. **Proses Pemilihan Anggota BPD:** Proses pemilihan dan pengangkatan anggota BPD di Desa Lolomaya cenderung dilakukan oleh Kepala Desa dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Kepala Desa. Praktik ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi anggota BPD.
4. **BPD Sebagai Simbol:** BPD di Desa Lolomaya seringkali hanya menjadi simbol atau lambang semata, tanpa memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan.
5. **Kurangnya Aktivitas Musyawarah:** BPD kurang aktif dalam melakukan musyawarah dan rapat koordinasi dengan pemerintah desa. Aktivitas ini penting untuk memastikan adanya komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa serta untuk membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Faktor-faktor penyebab masalah ini dapat mencakup kurangnya pemahaman dan kapasitas anggota BPD, pengaruh politik, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan komunikasi yang buruk antara BPD dan pemerintah desa.

Penelitian mengenai strategi BPD dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa menjadi sangat relevan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Dengan memahami tantangan yang dihadapi BPD dan menganalisis strategi yang telah diterapkan, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan dana desa secara keseluruhan dan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Lolomaya. Penelitian ini bertujuan untuk

memahami secara langsung bagaimana BPD menjalankan fungsinya dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam upaya memperbaiki kinerja BPD dan meningkatkan pengelolaan dana desa di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Strategi

merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Menurut Rachmat dan Irfan (2022), strategi melibatkan koordinasi tim, identifikasi faktor pendukung, serta penerapan gagasan yang rasional dan efisien. Michael Porter mendefinisikan strategi sebagai kumpulan tindakan yang bertujuan menciptakan nilai melalui pendekatan bisnis untuk hasil yang memuaskan. Fungsi strategi mencakup mengkomunikasikan visi, menghubungkan kekuatan dengan peluang, serta meningkatkan sumber daya untuk merespons kondisi baru (Sofjan Assauri, 2016).

Pengawasan

dalam konteks pemerintahan desa, diatur oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja kepala desa, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Chobib Soleh dan Suprito (Joya Hanafi, 2023) mendefinisikan kinerja sebagai pencapaian pelaksanaan kegiatan atau kebijakan untuk mencapai sasaran organisasi, sedangkan Milner mengartikan kinerja sebagai ekspektasi terkait fungsi dan perilaku sesuai tugas yang diberikan.

Kinerja

didefinisikan oleh Mangkunegara (dalam Sopiha dan Sangadji, 2017) sebagai hasil

kerja dalam hal kualitas dan kuantitas. Kualitas mencakup kehalusan, kebersihan, dan ketelitian, sedangkan kuantitas berhubungan dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Hasibuan (2016) menambahkan bahwa kinerja meliputi hasil kerja berdasarkan kecakapan dan pengalaman, sementara Miner (dalam Sudarmanto, 2014) mencakup dimensi kualitas, kuantitas, penggunaan waktu, dan kerjasama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga demokrasi desa yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024. BPD berperan dalam membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa (Pasal 55). Tantangan dalam pengawasan BPD termasuk kurangnya kapasitas dan sumber daya, keterbatasan informasi, dan resistensi dari aparat desa.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman fenomena sosial dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mendalami pengalaman, pandangan, dan interaksi dalam konteks sosial tertentu, sehingga sangat sesuai untuk mengkaji peran dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam dinamika, interaksi, dan konteks yang mempengaruhi kinerja BPD dalam desa.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau komunitas yang menjadi fokus analisis dalam penelitian kualitatif. Menurut Melong (2019), subjek penelitian

adalah sumber data yang penting untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, subjek ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti tentang relevansi dan representativitasnya (Sugiyono, 2018). Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. **Informan Kunci:** Ketua DPD yang memiliki informasi strategis terkait dengan fungsi pengawasan BPD.
2. **Informan Utama:** Sebanyak 12 orang pemerintah desa yang terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan berbagai kepala seksi serta kepala dusun.

Informan tambahan mencakup masyarakat sekitar desa yang memberikan perspektif tambahan meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan opini informan terkait topik penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan teknik terstruktur, yaitu dengan mempersiapkan panduan wawancara (interview guide) untuk memastikan konsistensi dan kedalaman informasi yang diperoleh. Proses wawancara melibatkan pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi esensial, meskipun informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang bersifat pribadi atau rahasia.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami perilaku, interaksi, dan kondisi sosial secara langsung dalam lingkungan alami subjek penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika dan konteks sosial yang mempengaruhi peran BPD. Observasi dilakukan dengan mencatat perilaku dan interaksi yang relevan, serta kondisi yang mempengaruhi kinerja BPD.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi atau studi pustaka digunakan untuk menelusuri data sejarah, literatur, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan untuk memberikan konteks tambahan atau verifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian. Data ini mencakup informasi terkini dan relevan yang diperoleh dari interaksi langsung dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber yang telah ada, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memberikan konteks pada data primer.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi, memilih, dan memilah data untuk menemukan pola dan makna yang penting bagi penelitian. Menurut Moleong (2019), langkah-langkah analisis data meliputi pengelompokan data, pemilahan, dan penganalisisan untuk mendapatkan narasi yang menjawab rumusan masalah penelitian.

4. Pembahasan

Di tengah dinamika pemerintahan desa, pengawasan yang efektif menjadi krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang maksimal. Desa Lolomaya, meski kecil, menunjukkan bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan perannya secara signifikan dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa. Pendekatan inklusif dan transparan yang diterapkan oleh BPD Lolomaya telah menghasilkan interaksi yang positif antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada

peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan desa.

Strategi pengawasan yang diterapkan di Desa Lolomaya berpusat pada prinsip inklusivitas dan transparansi. BPD Lolomaya rutin mengadakan musyawarah desa sebagai forum utama untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa. Musyawarah ini memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan keluhan mereka secara langsung. Dengan cara ini, setiap program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan warga. Keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari proses yang demokratis dan akuntabel. Selain itu, BPD Lolomaya juga memanfaatkan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan. Dengan dukungan teknologi, BPD dapat memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa dan pelaksanaan proyek pembangunan. Teknologi informasi memungkinkan BPD untuk menyebarkan laporan pengawasan secara cepat dan luas, baik melalui papan pengumuman desa maupun media sosial. Langkah ini tidak hanya mempercepat distribusi informasi tetapi juga memperluas jangkauan publikasi, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Kolaborasi erat antara BPD dan perangkat desa merupakan kunci dalam implementasi strategi pengawasan yang efektif. Kepala Desa Lolomaya memberikan dukungan penuh terhadap pendekatan inklusif dan transparan ini. Kepemimpinan kepala desa yang mendukung praktek-praktek pengawasan yang baik memperkuat implementasi kebijakan dan strategi BPD. Rapat koordinasi rutin antara BPD dan

perangkat desa memungkinkan evaluasi kinerja yang terencana dan berkelanjutan. Dalam rapat ini, BPD dan perangkat desa dapat berdiskusi mengenai kemajuan proyek, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang diperlukan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dampak dari strategi pengawasan ini sangat signifikan. Terdapat peningkatan yang jelas dalam efisiensi pelaksanaan proyek pembangunan, pengelolaan dana desa, dan pelayanan publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa dan tim pengawas merasa lebih terhubung dengan proses pengambilan keputusan dan lebih yakin bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meskipun demikian, BPD Lolomaya menghadapi tantangan dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Keterbatasan ini sering kali menghambat efektivitas pengawasan yang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, BPD telah menjalin kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggotanya. Penerapan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan juga membantu mengatasi beberapa keterbatasan, meningkatkan efisiensi pengawasan secara keseluruhan.

Hubungan kerja yang baik antara Kepala Desa dan BPD merupakan fondasi penting dalam keberhasilan strategi pengawasan. Dengan mengadakan rapat koordinasi secara rutin dan berdiskusi terbuka mengenai perkembangan serta tantangan yang dihadapi, Kepala Desa dan BPD memastikan bahwa kebijakan dan

keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan masyarakat. Kolaborasi yang kuat ini mencerminkan komitmen mereka untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, strategi pengawasan yang inklusif dan transparan yang diterapkan oleh BPD Lolomaya telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Melalui partisipasi aktif masyarakat, evaluasi berkelanjutan, dan kolaborasi erat antara perangkat desa dan BPD, Desa Lolomaya berhasil menjaga dan meningkatkan kesejahteraan serta kehidupan berdemokrasi warganya. Langkah-langkah ini juga memberikan inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengawasan pemerintahan lokal, yang pada gilirannya dapat memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan strategi, BPD Lolomaya tidak hanya meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggotanya, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dan akurat. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat desa.

5. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan penelitian penulis dengan judul Strategi BPD Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintahan Desa Di Desa Lolomaya Kecamatan Oou Kabupaten Nias Selatan

1. Dari analisis terhadap strategi pengawasan yang diterapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lolomaya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan inklusif dan transparan telah

membawa dampak positif yang signifikan bagi kualitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Melalui partisipasi aktif masyarakat, publikasi laporan secara berkala, serta kolaborasi erat antara perangkat desa dan BPD, Desa Lolomaya mampu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintahan didasarkan pada konsultasi yang luas dan mendalam dengan warga. Adanya pengawasan yang ketat juga telah meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pengelolaan dana desa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan menjadi hambatan utama bagi BPD Desa Lolomaya dalam menjalankan pengawasan efektif terhadap kinerja pemerintahan desa. Kurangnya anggota dengan keterampilan spesifik seperti keuangan, serta dana yang terbatas untuk inspeksi lapangan dan pengembangan teknologi, menjadi tantangan serius yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan.

Daftra Pustaka

Mangkunegara, Anwar Prabu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*, Bandung : CV Pustaka Setia

Setyaningrum, Purwani, Retno, DKK. (2022). *Evaluasi Kinerja*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center

Sofjan Assauri. (2016). *Strategic Management*, Jakarta: Rajawali Pers

Sopiah dan Sangadji. (2017). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta

Estepanus Dauwole, Johannis Kawoan, (2017) Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam Perencanaan Pembangunan (Studi kasus di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara

Haryadi, 2017. Perancangan Sistem Manajemen Kinerja Anggaran (Studi Kasus : LPTIK Universitas Andalas)

Rachmat Hidayat, Irfan Nursetiawan, 2022. Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang D